

MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN BAGI MAHASISWA BARU

Abdurrohman¹, M. Zainul Asror²
Universitas Hamzanwadi^{1,2}
armindo.dmk@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada mahasiswa baru dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian menggunakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model pendidikan kebangsaan yang diterapkan pada Program Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) didesain bukan dengan pola indoktrinasi dan penataran melainkan bersifat dialogis, kreatif dan inovatif yang relevan dengan karakter generasi milenial masa kini. Implementasi kegiatan diklasifikasi menjadi dua ranah; yaitu ranah ilmiah (mind) melalui kajian ilmiah kritis-reflektif dan ranah non ilmiah (attitude) yang mengandung unsur kreativitas, permainan dan seni. Simpulan penelitian bahwa model pendidikan kebangsaan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) dalam upaya penanggulangan terorisme sebagai bagian dari pendekatan *soft power* dalam rangka memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air dikalangan mahasiswa baru, masih menjadi problem kontemporer kebangsaan.

Kata Kunci: Kebijakan, Mahasiswa Baru, Model, Pendidikan Kebangsaan

ABSTRACT

The purpose of this research is to strengthen national insight and love for the homeland in new students in countering radicalism. The research method uses descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that the national education model applied to the Campus Life Program for New Students (PKKMB) is designed not with a pattern of indoctrination and upgrading but is dialogical, creative and innovative which is relevant to the character of today's millennial generation. The implementation of activities is classified into two domains; namely the scientific domain (mind) through critical-reflective scientific studies and the non-scientific domain (attitude) which contains elements of creativity, games and art. The conclusion of the study is that the national education model in order to support government policies through the National Action Plan for Combating Extremism (RAN-PE) in an effort to combat terrorism as part of the soft power approach in order to foster a sense of nationalism and love for the homeland among new students, is still a contemporary problem of nationality.

Keywords: New Student, Model, National Educatio, Policy

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri kendati dunia tengah dilanda pandemi covid-19, fenomena radikalisme masih menjadi wacana seksis yang banyak menyita perhatian dunia termasuk di Indonesia. Karena itu radikalisme telah menjadi *common enemy* bagi warga dunia. Secara konseptual istilah radikalisme selalu berkorelasi dengan terorisme, karena radikalisme mengacu pada *mind* dan *attitude*, sedangkan terorisme mengacu pada tindakan (action). Di Indonesia tepatnya pasca orde reformasi gerakan kelompok keagamaan trans-nasional yang berideologi radikal telah tumbuh subur. Secara sosiologis kelompok keagamaan trans-nasional tersebut merupakan kelompok keagamaan *non-mainstream* organisasi Islam Indonesia yang berhaluan *Ahlussunnah wal jamaah*. Pada titik ini, dengan munculnya gerakan kelompok Islam radikal telah merubah wajah Islam Indonesia menjadi intoleran dan eksklusif. Di samping itu keberadaannya tidak saja memunculkan stigma terhadap Islam sebagai agama teroris tetapi juga anti ideologi Pancasila sehingga menjadi ancaman serius bagi pondasi kebhinnekaan yang telah ditanam kuat oleh para pendiri bangsa sehingga berdirilah Indonesia.

Kini gerakan dan ideologi Islam radikal telah merasuki dunia pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi. Mengacu pada temuan dari berbagai lembaga survey dan riset bahwa wajah Perguruan Tinggi kita kian menunjukkan aura radikalismenya. Survey yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 39 persen mahasiswa sudah terpapar paham radikalisme (Hasanuddin, 2018), Kemudian hasil survei The Wahid

Foundation tahun 2017 melaporkan dari 1.800 mahasiswa dari 25 perguruan tinggi 29,5% responden tidak mendukung pemimpin non muslim, 19,8% mahasiswa menyetujui peraturan Daerah syariah, dan 23% mahasiswa setuju dengan berdirinya negara Islam. Sedangkan hasil penelitian Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PusPIDep Yogyakarta pada tahun 2017, menemukan gerakan jihadi, tahriri, dan salafi mulai mendominasi di banyak Perguruan Tinggi, dimana gerakan-gerakan tersebut menjadi embrio tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme. (Hasanuddin, 2018)

Mengacu pada hasil survey dan penelitian di atas dapat dianalisis bahwa gerakan Islam Radikal tidak lagi sekedar menjadi wacana (academic world) tetapi sudah menjadi fakta social (social fact) yang hadir dalam kehidupan kita bahkan sudah merasuki institusi akademik Perguruan Tinggi dimana target sasarannya adalah kaum intelektual calon pemimpin bangsa. Menurut laporan Setara Institute bahwa ideologi radikalisme yang masuk di Perguruan Tinggi adalah kelompok keagamaan puritan dan eksklusif (Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan eks HTI) dengan corak kegiatan keislaman yang cenderung monolitik (Latuconsina, 2019). Melalui metode terstruktur, sistematis, dan masif, gerakan radikalisme berusaha menguasai lingkungan kampus dengan menyusup di organisasi mahasiswa, masjid. Gerakan ini semakin mapan dengan sistem kaderisasi yang militan. Kampus menjadi target pergerakan untuk melahirkan generasi fundamentalis terdidik (Latuconsina, 2019)

Lebih lanjut, aura radikalisme yang mulai menggejala di kalangan mahasiswa, tidak hanya terjadi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetapi juga di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Gerakan kelompok radikal yang notabene anti ideologi Pancasila apabila tidak segera kita atasi maka akan menjadi bahaya laten dan menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya apabila gerakan radikal ini menguat di dunia kampus, tidak mustahil kampus yang selama ini dikenal sebagai pusat peradaban dan kemajuan bangsa yang berfikir ilmiah-moderat-inklusif akan berubah wujud menjadi lembaga pendidikan yang menjadi tempat persemaian bagi kelompok radikal dalam merancang berbagai program dan tindakan penyelewengan secara sistematis dan masif sehingga pada akhirnya menghancurkan pondasi kebhinnekaan Indonesia. Pendidikan seharusnya menjadi salah satu instrument fundamental sebagai media pembentuk karakter bangsa (Mukhibat, 2015) Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi dan menanggulangi arus radikalisme yang kian subur di Perguruan Tinggi?. Inilah yang menjadi titik *concern* dalam penelitian ini. Selama ini penanggulangan aksi terorisme dan radikalisme dinegeri ini dilakukan dengan pendekatan *hard power* melalui aparat keamanan yang oleh beberapa kalangan dianggap tidak efektif. Karena itu perlu ada langkah dan upaya strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya radikalisme yang bersemayam di kampus yaitu dengan mengembangkan model pendidikan kebangsaan untuk mahasiswa baru. Menurut Hasanuddin Ali ada tiga tingkatan radikalisme

mahasiswa. Pertama, mahasiswa yang baru menjadi simpatisan. Kedua, mereka yang sudah masuk ke dalam organisasi radikal. Ketiga, mahasiswa yang sudah berani melakukan tindakan (Hasanuddin, 2018).

Pengembangan model pendidikan kebangsaan ini sebagai pendekatan *soft power* dengan mengangkat isu-isu Kebhinnekaan, nasionalisme dan memperkuat ideologi Pancasila. Model kebijakan pendidikan kebangsaan ini sekaligus mendukung kebijakan yang digagas pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) dalam upaya penanggulangan terorisme Rencana aksi ini memiliki empat pilar utama, yakni pencegahan (kesiapsiagaan, kontradikalisasi, perlindungan), deradikalisasi, penegakan hukum, serta kemitraan kerja sama internasional. (Peraturan Presiden RI No. 7, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and development). Produk dalam penelitian pengembangan ini berupa dokumen model kebijakan pendidikan kebangsaan bagi mahasiswa baru. Penelitian ini dilakukan dilima Perguruan Tinggi Se-Pulau Lombok baik Negeri maupun Swasta. Lokasi penelitian ini ditetapkan secara *purposive* sebagai tempat melakukan *need asesmen*, pengumpulan data dan ujicoba produk. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Perguruan Tinggi (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan), Dekan, panitia PKKMB dan mahasiswa baru. Penentuan subjek dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Sedangkan analisis data menggunakan analisa kualitatif yang terdiri reduksi data, tampilan data dan kesimpulan (Mile, 1994)

Sedangkan instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut; a). Lembar observasi. Instrumen ini digunakan untuk mengamati kegiatan akademik di kampus dan pelaksanaan PKKMB; b). Angket *need assessment*. Angket ini ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk memperoleh data kebutuhan tentang model Pendidikan Kebangsaan yang diimplementasikan pada pelaksanaan Program Pengenalan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif model Mile dan Huberman; c). Pedoman wawancara. Instrumen ini digunakan untuk mewawancarai pimpinan Perguruan Tinggi, Panitia PKKMB dan mahasiswa terkait pelaksanaan PKKMB. Kegiatan observasi dan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait program Pendidikan Kebangsaan pada pelaksanaan PKKMB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model dan Pendekatan Pendidikan Kebangsaan

Model kebijakan Pendidikan Kebangsaan pada PKKMB dikembangkan berdasarkan fenomena empiris dan kondisi *factual* yang terjadi yaitu semakin luntarnya nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda disatu sisi dan menguatnya kelompok-kelompok keagamaan radikal *non-mainstream* disisi lain. Fenomena empiris kemudian ditelaah, dikembangkan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan.

Pendidikan kebangsaan adalah suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme (Wahyuni, 2018; Zurayah, 2019). Tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah membina wawasan kebangsaan warga negara menciptakan harmonisasi, membangun demokratisasi dan toleransi social (Barida, 2017; Komarudin et al., 2019; Wahyuni, 2018; Zurayah, 2019).

Dalam konteks penelitian ini model pendidikan Kebangsaan dikembangkan bertujuan untuk menangkal radikalisme dikalangan mahasiswa khususnya mahasiswa baru. Untuk mencapai tujuan tersebut model Pendidikan Kebangsaan dikembangkan menggunakan model partisipatif dengan pendekatan *top-down* (Zurayah, 2019; Arief, 2020). Model partisipatif dipilih karena dalam merumuskan kebijakan melibatkan berbagai pihak yaitu kalangan akademisi, TNI/POLRI, Bakesbangpol, pimpinan Perguruan Tinggi, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *top-down*. Dalam pendekatan ini peran Pimpinan Perguruan Tinggi sangat besar dan menjadi aktor kunci (*key person*) dalam keberhasilan implementasi model.

Aktor Penentu Kebijakan

Dalam Implementasi model pendidikan kebangsaan bagi mahasiswa baru dibutuhkan dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi. Tanpa ada dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi mustahil model pendidikan kebangsaan bisa diimplementasikan. Karena itu *political will* dari pimpinan menjadi penentu keberhasilan dalam implementasi model pendidikan kebangsaan karena menyangkut masalah strategis yakni pencegahan terorisme

yang akan mengancam generasi bangsa. Sedangkan yang dimaksud aktor penentu kebijakan adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Dekan. Mengingat radikalisme menjadi isu strategis maka Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik pusat peradaban bangsa dimasa mendatang dimana para generasi bangsa didik dan dibina sudah seharusnya Perguruan tinggi turut mendukung program pemerintah dalam menanggulangi radikalisme. Bukan sebaliknya Perguruan Tinggi justru menjadi tempat persemaian gerakan radikal yang mengancam eksistensi bangsa. Dengan demikian, model pendidikan kebangsaan diharapkan menjadi miniatur keindonesiaan dan berperadaban dalam kehidupan kampus.

Pihak Pihak yang Terlibat

Dalam merumuskan Model Pendidikan kebangsaan tentunya melibatkan berbagai pihak dalam mendukung terlaksananya pendidikan kebangsaan. Dalam hal ini keterlibatan berbagai pihak tidak hanya pada tahap proses tetapi juga pada tahap implementasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain kalangan akademisi, TNI/POLRI, Bakesbangpol, pimpinan Perguruan Tinggi, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak tersebut dilakukan dalam setiap tahapan baik itu melalui tahap perancangan, masukan ide atau gagasan melalui FGD maupun paada tahap implementasi sehingga hasil model kebijakan pendidikan kebangsaan akan mencerminkan konsensus dari berbagai pihak secara demokratis.

Model Kebijakan Pendidikan Kebangsaan Bagi Mahasiswa Baru

Pendidikan kebangsaan memiliki keterkaitan dengan masalah multikulturalisme, terutama di negara-negara yang masyarakatnya memiliki beragam etnis, agama, budaya, Bahasa dan lain-lain (Barida, 2017; Komarudin et al., 2019). Pendidikan kebangsaan penting diajarkan karena sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural. Apalagi secara factual Indonesia dihadapkan masalah kebangsaan yaitu lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan tumbuh suburnya kelompok keagamaan berideologi radikal. Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini radikalisme menjadi masalah kontemporer kebangsaan dan menjadi ancaman bagi kebhinnekaan kendati berbagai upaya telah dilakukan pemerintah.

Model Kebijakan Pendidikan Kebangsaan pada Program Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan selama satu hari dengan durasi waktu 430 menit. Ada beberapa alasan model kebijakan Pendidikan Kebangsaan diimplementasikan PKKMB; 1). Nihilnya kegiatan kampus yang bernuansa cinta Tanah Air dan bela negara dalam kegiatan kemahasiswaan (bidang non-akademik). 2). Minimnya muatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kegiatan pembekalan mahasiswa baru; 3). PKKMB menjadi *entry-point* generasi milenial ke dalam dunia akademik dan akan berkenalan dengan berbagai varian ideology dan pemikiran.

Model Pendidikan kebangsaan didesain bukan dengan cara indoktrinasi dan penataran sebagaimana penataran pada pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4) di era 90-an, melainkan bersifat dialogis dan kreatif yang relevan dengan karakter generasi milenial masa kini (Rohman, 2018; Widuseno, 2019). Model kegiatannya melalui kajian ilmiah kritis-reflektif (mind) dan kegiatan non-ilmiah (attitude) yang mengandung unsur kreativitas, permainan dan seni. Model Pendidikan Kebangsaan ini di desain berdasarkan hasil analisis kebutuhan (need assessment) dari stakeholders kemudian dilanjutkan dengan kajian diskusi intensif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para akademisi, Pimpinan Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan dan perwakilan mahasiswa. Untuk lebih jelasnya berikut ini model kebijakan Pendidikan Kebangsaan pada pelaksanaan Program Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Gambar 1. Model Kebijakan Pendidikan



Kebangsaan Pada Mahasiswa Baru (Abdurrohman, 2021)

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa model kebijakan pendidikan kebangsaan bagi mahasiswa

baru dalam pelaksanaan Program Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diklasifikasi menjadi dua ranah; yaitu Ranah Ilmiah dan ranah Non Ilmiah (mind). Ranah ilmiah difokuskan pada tema besar agama dan nasionalisme dengan durasi waktu 150 menit. Tema ini penting disampaikan mengingat generasi muda banyak yang belum memiliki dasar pemahaman agama yang kuat tentang agama dan nasionalism sehingga menjadi target sasaran bagi kelompok-kelompok Islam radikal. Di samping itu anak muda memiliki kepribadian yang belum stabil sehingga mudah dipengaruhi dan diindoktrinasi. Karena itu ranah ilmiah ini bertujuan memperkuat basis ilmu agama bagi mahasiswa sehingga tidak memiliki pemahaman miskonsepsi antara agama dan nasionalisme. Agama dan Nasionalisme seringkali menjadi *entry point* untuk cuci otak bagi generasi muda dengan cara membangun persepsi bahwa antara agama dan nasionalisme itu berlawanan. Karena itu ranah ini sekaligus menjadi benteng menolak paham radikalisme. Tema agama dan Nasionalisme ini dibagi menjadi tiga sub tema yaitu; Islam dan Pancasila, Khilafah dalam perspektif Islam dan menangkal radikalisme di media social. Kajian ini akan disampaikan kepada narasumber yang *expert* dibidangnya seperti tokoh agama atau intelektual muslim yang memiliki paham kegamaan yang moderat.

Sedangkan ranah non-ilmiah dikemas melalui kegiatan yang mengandung kreativitas dan seni yang sesuai dengan jiwa generasi milenial. Kegiatan ini diklasifikasi menjadi tiga bidang yang berdurasi 280 menit yaitu; social budaya, sejarah dan tokoh dan seni. Bidang sosial budaya ini disebut

dengan *The Power of Nusantara* karena kegiatannya mencerminkan “identitas keindonesiaan” yang memperkenalkan ragam budaya, etnis dan tradisi nusantara seperti memperkenalkan dan pemakaian busana adat daerah, mengenalkan istilah sapaan tiap tiap daerah dalam perjumpaan, Memberi tugas kepada mahasiswa untuk mencari dan memotret kehidupan nyata dari kegiatan tradisi dan etnis, budaya, agama serta menceritakan dari kasus keluarga, kerabat dekat atau tetangga yang menikah berbeda etnis (amalgamasi) dan menetap di luar daerah.

Dibidang sejarah dan tokoh dikemas dengan permainan kuis berbasis digital. Mahasiswa diminta menjawab berbagai pertanyaan yang memuat tanggal berkaitan dengan peristiwa bersejarah, Pahlawan Nasional dari berbagai daerah dan tokoh panutan. Bidang ini bertujuan untuk mengingatkan memori mahasiswa terkait peristiwa sejarah bangsa dan pahlawan bangsa yang telah berjasa dalam perjalanan sejarah bangsa. Untuk itu bidang ini diistilahkan dengan “melawan lupa”.

Sedangkan dibidang seni dikemas dengan penayangan film pendek yang bertema nasionalisme. Kegiatan ini berdurasi 90 menit. Kegiatan ini tidak semata-mata menonton film semata tetapi mahasiswa diminta berdiskusi dan menganalisis terkait film yang ditayangkan tersebut. Kegiatan menonton film ini dibagi menjadi beberapa kelompok per fakultas. Setiap kelompok mengamati film yang berbeda-beda. Kemudian sebagai penutup mahasiswa diminta menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah sebagai wujud dari kebhinekaan dan persatuan

SIMPULAN

Secara faktual Indonesia dihadapkan pada masalah kebangsaan terutama luntarnya nasionalisme dikalangan generasi muda disatu sisi dan tumbuh suburnya kelompok keagamaan berideologi radikal disisi lain. Karena itu radikalisme masih menjadi masalah kontemporer kebangsaan. Apalagi ideologi radikal disinyalir telah merasuki dunia akademik yaitu Perguruan Tinggi. Karena itu pendidikan kebangsaan menjadi *condition sin qua non* dalam memupuk jiwa nasionalisme dan cinta tanah airdikalangan mahasiswa baru.

Pendidikan kebangsaan memiliki keterkaitan dengan masalah multikulturalisme, terutama di negara-negara yang masyarakatnya memiliki beragam etnis, agama, budaya, Bahasa dan lain-lain. Pada titik inipendidikan kebangsaan penting diajarkan karena sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural. Model Pendidikan Kebangsaan pada Program pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) didesain tidak dengan pola indoktrinasi dan penataran melainkan bersifat dialogis dan kreatif yang relevan dengan karakter generasi milenial masa kini. Dalam konteks ini pendidikan kebangsaan diklasifikasi menjadi dua ranah; yaitu Ranah Ilmiah (mind) dan ranah Non Ilmiah (attitude). Ranah ilmiah difokuskan pada tema besar yaitu agama dan nasionalisme dengan durasi waktu 150 menit.

Sedangkan ranah non-ilmiah dikemas melalui kegiatan yang mengandung kreativitas dan seni yang sesuai dengan jiwa generasi milenial. Kegiatan ini diklasifikasi menjadi tiga bidang yang berdurasi 280 menit yaitu; social budaya, sejarah dan tokoh dan

seni. Model pendidikan kebangsaan ini sebagai bagian dari pendekatan *soft power* dalam mendukung program pemerintah untuk menangkal radikalisme di dunia kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, A., & Syamsiar, H. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagaman Inklusif untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA. *Fenomena*, 9(1), 105-122 [10.21093/fj.v9i1.789](https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.789)
- Arief, D. B. (2020). Reorientasi Pendidikan Kebangsaan Berbasis Adab: Konsep dan Problematikanya. *PKn Progresif*, 12(1), 14–38 <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44898>
- Barida, M. (2017). Inklusivitas Vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Kedamaian yang Hakiki bagi Masyarakat Indonesia. *Universitas Ahmad Dahlan*, 5(February), 1403–1409 <http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/268-MUYA-BARIDA1403-1409.pdf>
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1989). *Educational Research. An Introduction* (5th ed.). White Plains, NY: Longman
- Hasanuddin, A. (2018). *Perlu Program Kontraradikalisasi Sasar Seluruh Pihak di Universitas*. SKH Kompas <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=532>
- Komarudin, Alkhudri, A. T., Ubedilah, Syaifudin, & Casmana, A. R. (2019). The nationality education model: The implementation of a score-a training model for youth across different cultures in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(2), 308–322
- Latuconsina, H. (2019). *Membentengi Perguruan Tinggi dari Radikalisme*. Kompas. <https://kompas.id/baca/opini/2019/06/22/membentengi-perguruan-tinggi-dari-radikalisme/>
- Wahyuni, N. M. (2018). *Pendidikan dan Kebangsaan*. *Media Indonesia*.
- Miles, M.,B., & Huberman, A.M. 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, CA: Sage publication
- Mukhibat, M. (2015). Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme Berbasis Studi Etnopedagogi di PTNU dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis. *Islamica : Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 222–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.222-247>
- Peraturan Presiden RI No. 7, (2021). Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Rohimah, R. B. (2019). Persepsi Santri tentang Moderasi Islam dan Wawasan Kebangsaan. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 139-156 <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.02>
- Rohman, F. (2018). Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan Pendekatan Bayani di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1),

53

<https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.2876>

<https://doi.org/10.24260/raheema.v6i1.1154>

Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Widiususeno, I., & Sudarsih, S. (2019). Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Salatiga Kotamadia Salatiga. *Harmoni*, 3(1), 24–28

<https://doi.org/10.14710/hm.3.1.24-28>

Yuniarto, H. B. (2021). *Wawasan Kebangsaan*. Deepublish.

Zurayah, H., & Rosilawati, A. (2019). Pengembangan Model Pendidikan Penguatan Kebangsaan Bagi Anak-Anak Wilayah Perbatasan (Studi di Desa Aruk Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas) Helva Zurayah dan Ana Rosilawati IAIN Pontianak. *Raheema : Jurnal Studi Fender dan Anak*, 6(1), 21–32